

SNEAK PEAK

HASIL RISET INDEKS
STANDAR BUDIDAYA
PADI BERKELANJUTAN
DI JAWA TENGAH DAN
JAWA TIMUR





RINGKASAN EKSEKUTIF

Gagasan beras berkelanjutan didasari pada kenyataan bahwa daya dukung lingkungan, lahan, sumberdaya manusia, dan kebijakan belum mampu sepenuhnya menjamin keberlangsungan produksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan. Selama ini, upaya memperkuat sektor perberasan telah diupayakan oleh banyak pihak. Namun, penguatan sektor perberasan tersebut fokusnya masih sebatas peningkatan produksi. Sektor perberasan juga harus dikelola dalam kerangka tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemitraan, akuntabilitas dan transparansi, penghormatan terhadap hukum dan perundangan yang adil, partisipasi dari semua pihak, serta bebas korupsi dan pemburu rantai ekonomi.

Kegiatan riset standar budidaya beras berkelanjutan ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang berlangsung di level kabupaten yakni dorongan pembentukan kemitraan. Dalam menyusun kemitraan beras berkelanjutan, salah satu hal penting adalah mengetahui bagaimana standar budidaya yang diharapkan oleh calon mitra. Dengan begitu, kegiatan riset ini memberi kemanfaatan bagi petani maupun pelaku usaha untuk menetapkan bagaimana standarisasi budidaya beras dapat mengarah ke keberlanjutan dan saling menguntungkan. Sementara di level nasional, hasil laporan standarisasi budidaya beras berkelanjutan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi penyusunan national interpretation guideline SRP dalam forum national working group (NWG).



**DISEMINASI HASIL
RISET STANDAR
BUDIDAYA BERAS
BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BOYOLALI**



Pada 4 Juli 2024 lalu, diseminasi kajian praktik budidaya beras berkelanjutan dilakukan oleh team KRKP di Kab. Boyolali.

Diseminasi kajian dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya; dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, dinas PSDA, asosiasi petani organik Boyolali (APOB), dan petani lokal Boyolali.

Secara keseluruhan, praktik beras berkelanjutan di Kab. Boyolali sudah dianggap cukup berkelanjutan dengan beberapa aspek, seperti penggunaan input kimia yang perlahan mulai ditinggalkan.

Adapun temuan lainnya adalah kurang layak nya infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti rusaknya beberapa saluran irigasi, kurangnya upaya regenerasi petani, dan keterbatasan permodalan petani.



Hasil Riset menunjukkan, bahwa seluruh responden petani berada di atas usia 39 tahun, dengan rentang usia 48 - 87 tahun yang menunjukkan rendahnya regenerasi petani di wilayah tersebut.

Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyoroti rendahnya regenerasi petani di wilayahnya.

"Generasi millennial butuh permainan baru. Kalau disodorkan teknologi orang tua, itu bukan teknologi, tapi barang antik. Mereka butuh pertanian yang menyenangkan dan menghasilkan cuan. Faktanya seperti itu, sedikit petani muda. Organik juga butuh teknologi". -Kris, Desa Krasak

Hasil ini didukung pula oleh laporan BPS Kab. Boyolali, bahwa hanya sebesar 13% petani millennial yang terdapat di Kab. Boyolali. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong regenerasi petani, sebab berpengaruh pada pembangunan pertanian di masa depan.



Dalam aspek permodalan, mayoritas petani (83%) memiliki permodalan yang terbatas untuk menjalankan usahatani padi. Permodalan ini diperolehnya hanya dengan dana pribadi.

Aspek permodalan menjadi hal yang krusial, sebab dengan keterbatasan permodalan, maka seseorang akan sulit dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kendala dan tantangan pertanian di Kab. Boyolali masih harus dilakukan perbaikan untuk mencapai pertanian berkelanjutan yang optimal. Dengan perbaikan tata kelola pertanian padi dan beras, maka akan mampu mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial petani yang lebih baik.



**DISEMINASI HASIL
RISET STANDAR
BUDIDAYA BERAS
BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN KLATEN**



Diseminasi kajian riset standar budidaya beras berkelanjutan di Kab. Klaten telah terlaksana pada tanggal 18 Juli 2024. Hasil riset ini disampaikan kepada beberapa pihak yang hadir, diantaranya DKPP Kab. Klaten, DLH, DPUPR, DKUKMP, Bag. Perekonomian, BPP, IPPHTI, POKTAN, GAPOKTAN, dan Pemerintah Desa Demak Ijo.

Hasil riset menunjukkan, bahwa secara keseluruhan indeks keberlanjutan praktik budiaya padi di Kab. Klaten memperoleh indeks sebesar 64,91% dengan capaian status cukup berkelanjutan. Hal ini menggambarkan bahwa petani Klaten telah cukup baik dalam pelaksanaan praktik standar budidaya padi. Hal ini didasarkan oleh setidaknya terdapat tiga dimensi keberlanjutan yang memiliki hasil "cukup berkelanjutan" yakni ekonomi (81,03%), kelembagaan dan kebijakan (72,54%), sosial (68,52%), dan lingkungan (64,52%). Sementara dimensi lainnya masih mencapai status "kurang berkelanjutan", yakni teknologi (37,93%).



Praktik standar budidaya padi di Kabupaten Klaten untuk mencapai status keberlanjutan optimalnya, maka dibutuhkan intervensi melalui perbaikan tata kelola terutama pada aspek-aspek yang belum berjalan optimal. Dimensi ekonomi sebagai pendukung peningkatan keberlanjutan masih mengalami kendala, terutama pada aspek permodalannya.

Pada penelitian ini, aspek permodalan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan standar budidaya padi. Demikian berpengaruhnya, maka penting untuk diutamakan. Dalam temuan hasil penelitian, rata-rata petani di Kab. Klaten memiliki keterbatasan pada permodalan usahatani. Sebagian besar permodalan petani berasal dari dana pribadi, serta masih sedikit petani yang mampu mengakses lembaga keuangan sebagai bantuan pembiayaan usahatannya.



Pada dasarnya, petani membutuhkan teknologi dan inovasi baru yang dapat membantunya dalam budidaya padi yang efektif dan efisien, namun tetap memerhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Pada penerapan teknologi, sistem pengairan basah-kering atau yang dikenal alternate wetting and drying (AWD) merupakan aspek yang berpengaruh terhadap keberlanjutan budidaya Kab. Klaten. Sayangnya, mayoritas petani klaten (57%) belum secara menyeluruh menerapkan sistem pengairan tersebut. Dibutuhkan peran para pihak, baik penyuluh maupun pemerintah untuk mensosialisasikan teknologi dan inovasi budidaya berkelanjutan, serta membantu petani mengatasi hambatan dalam pengadopsian suatu teknologi.

**DISEMINASI HASIL
RISET STANDAR
BUDIDAYA BERAS
BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN SRAGEN**



Diseminasi kajian Standar budidaya beras berkelanjutan Kab. Sragen telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2024. Kajian ini disampaikan kepada beberapa pihak seperti Biro Perencanaan Kementerian RI, DKPP Kab. Sragen, GAPOKTAN, PPL, BOPT, dan KTNA. Sama seperti hasil yang ditemukan di daerah lainnya, riset menunjukkan bahwa pertanian di Kab. Sragen masih belum mendekati sempurna.

Berdasarkan riset, nilai indeks pertanian padi berkelanjutan yang diperoleh Kab. Sragen, khususnya pada lokasi penelitian mencapai 52,44% yang berarti pertanian di Kab. Sragen terkategori cukup berkelanjutan. Ini mengindikasikan bahwa masih adanya kekurangan dalam mencapai budidaya padi berkelanjutan, terutama pada dimensi lingkungan dan teknologi yang memiliki capaian indeks kurang berkelanjutan, lebih rendah dari dimensi lainnya.



Hal yang disoroti dari temuan riset ini adalah keberlanjutan petani dalam meningkatkan produksi padi, namun dibarengi dengan besarnya penggunaan pupuk kimia yang berbanding terbalik dengan praktik pertanian berkelanjutan.

Hal ini disampaikan pula oleh wakil KTNA, Bapak Ngadimin dalam forum diseminasi Kab. Sragen, "Sragen penggunaan pupuk dan pestisida kimia masih besar karena masih mengejar produksi padi Sragen agar tetap meningkat. Saya pun masih mengusahakan untuk bertani dengan sistem organik melalui penggunaan pupuk organik 25 kg untuk musim tanam selanjutnya, sehingga artinya Sragen dapat berinovasi mengurangi penggunaan pupuk kimia".

Dampak negatif penggunaan pupuk kimia juga banyak disadari oleh para petani. "Akibat penggunaan pupuk kimia yang terus menerus membuat struktur tanah menjadi rusak dan mengurangi kualitas tanah", terang petani Sragen.



Selain itu, petani juga melaporkan bahwa kurangnya pengelolaan kualitas jaringan irigasi sehingga kebutuhan air untuk sawah seringkali tidak terpenuhi, serta tidak adanya program yang mendukung generasi petani di wilayah mereka.

Peran aktif penyuluh memengaruhi praktik budidaya petani, namun keaktifannya dianggap kurang oleh sebagian besar petani. Sementara itu, disampaikan oleh Bapak Supriyanto dari DKP3 Kab. Sragen, bahwa penyuluh telah melakukan kerjanya dengan semaksimal mungkin, namun yang menjadi kendala adalah jumlah tenaga kerja penyuluh yang terbatas, sementara ranah kerjanya untuk satu penyuluh dapat mewakili hingga 15 kelompok tani.

Permasalahan yang termuat ini hanya sebagian kecil dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh petani. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan tindakan bersama dalam mewujudkan pertanian padi berkelanjutan di Kab. Sragen melalui intervensi tata kelola perberasan yang optimal.

**DISEMINASI HASIL
RISET STANDAR
BUDIDAYA BERAS
BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN NGAWI**





Diseminasi hasil riset kajian standar budidaya beras berkelanjutan di Kabupaten Ngawi telah dilakukan pada Rabu, 17 Juli 2024.

Diseminasi kajian dihadiri oleh berbagai macam pihak seperti petani, kelompok tani, Perpadi, PPK, PPL, Dinas PUPR, Bappeda, dan lainnya.

Hasil riset menunjukkan bahwa budidaya beras di Kabupaten Ngawi memiliki rata-rata angka indeks 60,46% yang berarti praktek budidaya beras cukup berkelanjutan, dengan angka indeks tertinggi dimiliki oleh dimensi ekonomi dan terendah oleh dimensi teknologi.

Secara umum, telah banyak petani Ngawi yang mengadopsi budidaya semi organik yang menunjukkan bahwa adanya pengurangan dalam penggunaan input berbahan dasar kimia. Selain itu, sebagian besar petani juga sudah menggunakan benih berkualitas dan bersertifikasi. Namun, masih banyak poin-poin yang harus diperhatikan dalam mencapai praktik yang berkelanjutan. Riset menemukan bahwa kondisi jaringan irigasi tidak memadai bagi banyak petani, terutama di musim kemarau. Akses terhadap permodalan pun masih tidak merata tersedia untuk petani. Keberadaan KUD juga tidak merata dan jika ada, peran KUD/BUMDES dirasa tidak optimal oleh para petani.



Diseminasi kajian menuai beberapa tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya mengenai isu ketersediaan air dan irigasi seiring dengan ketergantungan petani terhadap air sawah yang volumenya semakin berkurang per tahunnya.

"Penggunaan air tanah perlu disempurnakan dengan aturan atau tata ruang penggunaan air, dimana didalamnya perlu ada aturan hukum dan ijin yang disesuaikan dengan undang undang dan aturan lain, termasuk peratauran didalam Kawasan tertentu." – Haris, Petani

Selain itu, petani juga berharap adanya dorongan untuk upaya kemitraan dengan PPK, diseminasi yang lebih meluas mengenai regenerasi petani dan pendataan petani muda dari berbagai komoditas, serta pendataan yang lebih akurat mengenai ketersediaan beras nasional.



**DISEMINASI HASIL
RISET STANDAR
BUDIDAYA BERAS
BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN MADIUN**



Hasil kajian standar budidaya beras berkelanjutan telah didiseminasikan kepada para pihak pada Senin, 29 Juli 2024 di Kecamatan Saradan, Caruban, Madiun.

Diseminasi ini dihadiri oleh pihak-pihak dari berbagai lembaga seperti BAPPERIDA, DPP, DKP, Dinas PUPR, Kelompok Tani, PPK, POPT, IPOJI, KTNA, distributor pupuk, dan lainnya.

Hasil riset menunjukkan bahwa pertanian yang dilakukan di Kabupaten Madiun memiliki angka indeks keberlanjutan 62,61% yang menandakan bahwa praktek pertanian yang dilakukan sudah cukup berkelanjutan.



Kabupaten Madiun memiliki indeks tertinggi dalam segi ekonomi, meski masih belum mendekati angka sempurna. Sama seperti kondisi di 4 kabupaten lainnya, petani di Kab. Madiun juga masih memiliki keterbatasan akses permodalan. Selain itu, temuan mengenai kemitraan juga menuai tanggapan dari peserta diseminasi.

"Kebijakan yang disusun perlu adanya kolaborasi berbagai pihak, mulai dari budidaya hingga pemasaran demi keberlanjutan usaha beras dan perlu adanya program kemitraan agar petani tidak berjalan sendiri, karena selama ini petani bergerak sendiri. Dengan adanya kemitraan harapannya ada kemakmuran bagi petani dan ada kejelasan bagaimana proses kerjasamanya." – Suharno, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)



Di sisi lain, dimensi lingkungan menjadi dimensi yang memiliki angka indeks terendah meski masih berada di dalam kategori yang sama. Dalam prakteknya, sudah banyak petani yang mengadaptasi pertanian semi organik, bergeser kepada penggunaan input organik meski belum sepenuhnya. Namun yang perlu diperhatikan lebih adalah perolehan pupuk dan pestisida yang masih didapat dari toko alih-alih memproduksi sendiri. Inovasi seperti pestisida organik sudah tersedia namun petani memiliki keraguan untuk menggunakan inovasi tersebut.



"Namun yang petani takuti jika menyebarluaskan pestisida organik yang tidak memiliki ijin edar akan berurusan dengan pihak kepolisian. Sedangkan untuk ijin edar membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga akhirnya petani merasa ragu untuk melakukan budidaya sehat."
- Evnu, POPT

Dari tanggapan-tanggapan seperti di atas, perlu adanya penguatan dalam kebijakan pertanian mengenai berbagai aspek dari pertanian di Kabupaten Madiun. Pemerintah seharusnya mendorong upaya petani dalam memproduksi pupuk dan pestisida organik dan menciptakan kebijakan yang mendorong dan melindungi distribusi dari input organik.



Selain itu, peserta diseminasi juga berharap adanya kebijakan yang mendorong kemitraan antara petani dengan berbagai pihak seperti penggilingan dan bahkan kemitraan antar-kabupaten sehingga pasar yang dimiliki oleh petani menjadi lebih luas yang berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga petani dan penggilingan padi kecil.

Dokumen ini disusun dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa. Seluruh isi dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsorsium pelaksana The Low Carbon Rice Project dan dalam keadaan apa pun tidak dapat dianggap mencerminkan pandangan Uni Eropa.



Contact us!

@ kedaulatanpangan_id
kedaulatanpangan.org
kripindonesia@gmail.com